Copyright © 2025 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 14 No. 4 Nopember 2025

Analisis Kenaikan Biaya Pendidikan di Indonesia: Implikasi Sosial Ekonomi

Handyka Oktra Rajagukguk
Universitas Negeri Jakarta,Indonesia

handyka.oktra@mhs.unj.ac.id

Abstrak

Kenaikan biaya pendidikan di Indonesia menunjukkan pola yang sistematis dan berkelanjutan di seluruh jenjang, sementara alokasi anggaran publik 20% APBN/APBD belum sepenuhnya menahan pergeseran beban pembiayaan ke rumah tangga. Artikel ini mengkaji bagaimana eskalasi biaya Pendidikan, mencakup biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya digital pasca-pandemi, berkelindan dengan ketimpangan akses, risiko putus sekolah, dan mobilitas sosial, sekaligus mengidentifikasi ruang koreksi kebijakan pembiayaan. Penelitian menggunakan desain *systematic literature review* dengan pendekatan kualitatif–interpretatif terhadap publikasi dan dokumen kebijakan periode 2019–2025 yang relevan dengan konteks Indonesia. Dari 146 dokumen yang ditelusuri melalui berbagai basis data, 26 publikasi memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara tematik melalui tahapan *open coding, axial coding, dan selective coding* untuk mengonstruksi tema dan pola hubungan antar dimensi biaya, kebijakan, dan konsekuensi sosial ekonomi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kenaikan biaya pendidikan menguat dalam tiga rumpun biaya dan meningkatkan proporsi pengeluaran pendidikan dalam struktur belanja rumah tangga, terutama bagi kelompok miskin dan kelas menengah rentan. Eskalasi biaya, termasuk biaya teknologi, berperan sebagai mekanisme seleksi yang memperdalam ketimpangan akses, mendorong berbagai strategi adaptif yang bersifat defensif, serta berkontribusi pada reproduksi kemiskinan dan terhambatnya pembentukan modal manusia. Berbagai skema pembiayaan publik (BOS, BOSDA, PIP, KIP, KIP Kuliah, dan beasiswa daerah) meringankan sebagian biaya langsung, tetapi belum menjangkau biaya terselubung dan biaya digital yang menjadi sumber tekanan utama, sehingga "krisis keterjangkauan" biaya pendidikan tetap bertahan. Artikel ini menegaskan urgensi rekonstruksi arsitektur pembiayaan yang lebih progresif dan berbasis kemampuan bayar, sekaligus memperluas perlindungan bagi kelompok rentan sebagai prasyarat pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif.

Kata kunci: biaya pendidikan, pembiayaan pendidikan, ketimpangan akses, implikasi sosial ekonomi

Pendahuluan

Kenaikan biaya pendidikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang konsisten dan mengkhawatirkan, mulai dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi. Berbagai studi berbasis data rumah tangga dan kebijakan pembiayaan menegaskan bahwa meskipun alokasi anggaran pendidikan nasional telah mencapai 20% APBN, beban biaya langsung (seperti uang pangkal, SPP/UKT, iuran pengembangan) dan biaya tidak langsung (transportasi, buku, seragam, serta kebutuhan perangkat digital) yang ditanggung keluarga justru terus meningkat, termasuk bagi kelompok 40% rumah tangga terbawah. Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa rata-rata total biaya pendidikan meningkat pada semua kelompok pengeluaran rumah tangga, 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas, sehingga pendidikan kian sulit dijangkau oleh rumah tangga miskin dan rentan (Arsal &

Hidayat, 2024). Temuan serupa menegaskan bahwa kenaikan anggaran publik belum otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pembiayaan di tingkat satuan pendidikan, karena masih terdapat persoalan pemerataan, kualitas, serta disparitas pembiayaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk lembaga pendidikan Islam dan sekolah di daerah tertinggal (Asichul & Toha Ma'sum, 2025). Dalam konteks inilah, isu kenaikan biaya pendidikan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai konsekuensi teknis pengelolaan anggaran, melainkan sebagai gejala struktural yang beririsan dengan desain kebijakan, tata kelola pembiayaan, dan daya dukung ekonomi rumah tangga.

Implikasi sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan semakin nyata ketika dikaitkan dengan ketimpangan akses, reproduksi kemiskinan antar generasi, dan terbatasnya mobilitas sosial bagi kelompok berpendapatan rendah. Peningkatan biaya Pendidikan baik dalam bentuk biaya langsung maupun kebutuhan tambahan seperti gawai dan kuota internet telah memperberat beban keluarga kelas menengah bawah dan memperdalam kesenjangan kesempatan belajar, terutama pasca-pandemi ketika kesenjangan digital (*digital divide*) semakin menonjol (Mentari et al., 2025). Di sisi lain, berbagai skema bantuan seperti BOS, KIP, dan beasiswa daerah telah diperluas, persoalan ketepatan sasaran, keberlanjutan pendanaan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masih menjadi hambatan utama bagi kelompok miskin untuk menikmati pendidikan berkualitas (Asichul & Toha Ma'sum, 2025). Kenaikan biaya pendidikan berkorelasi dengan meningkatnya risiko putus sekolah, khususnya pada jenjang menengah, sehingga mempersempit peluang penguatan modal manusia dan memperbesar kemungkinan rumah tangga tetap terjebak dalam kemiskinan (Arsal & Hidayat, 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi kajian sistematis berbasis systematic literature review mengenai dinamika kenaikan biaya pendidikan dan implikasi sosial ekonominya di Indonesia, guna merumuskan rekomendasi pembiayaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Isu-isu terkini terkait kenaikan biaya pendidikan di Indonesia tampak pada menguatnya beban pengeluaran rumah tangga untuk menutupi berbagai komponen biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, pada seluruh jenjang pendidikan. Aprillianoni & Ali Jimale (2023) menunjukkan bahwa berbagai skema bantuan dan beasiswa yang dirancang untuk memastikan pembiayaan pendidikan yang adil belum terdistribusi secara merata, terdapat kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, serta antar daerah, sementara di banyak kabupaten/kota sebagian besar anggaran pendidikan habis untuk gaji dan tunjangan guru sehingga ruang fiskal untuk peningkatan mutu dan pengurangan beban biaya personal peserta didik menjadi sangat terbatas. Pada saat yang sama, transformasi perguruan tinggi negeri menjadi PTN-BH memunculkan problem baru, porsi pendanaan dari pemerintah terhadap PTN menurun dan digantikan "dana swadaya masyarakat" yang bersumber terutama dari biaya pendidikan mahasiswa. Prasetyo & Megawati (2025) menunjukkan bahwa dalam kerangka PTN-BH, otonomi keuangan dan model "*corporate university*" mendorong kampus mencari pemasukan di luar APBN, sehingga kenaikan biaya pendidikan tinggi menjadi konsekuensi logis dari berkurangnya subsidi dan menguatnya orientasi pasar yang berpotensi memperlebar kesenjangan akses pendidikan tinggi antar kelompok sosial. Dalam konteks ini, kajian sistematik mengenai kenaikan biaya pendidikan dan implikasi sosial ekonominya menjadi relevan untuk memetakan bagaimana eskalasi biaya memengaruhi mobilitas sosial, distribusi kesempatan pendidikan, serta efektivitas kebijakan publik dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang adil dan berkualitas.

Arsal & Hidayat (2024) menunjukkan, berdasarkan sintesis atas data BPS dan dokumen kebijakan, bahwa lonjakan biaya pendidikan tidak hanya muncul dalam bentuk uang sekolah atau SPP/UKT, tetapi juga iuran kegiatan, kontribusi perangkat pembelajaran digital, biaya transportasi, serta pengadaan materi belajar yang kian kompleks seiring digitalisasi

Copyright © 2025 The Author(s)

pembelajaran. Kenaikan ini terjadi pada hampir semua kelompok pengeluaran, sehingga rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah-bawah mengalami tekanan ganda: di satu sisi, mereka dituntut menjaga keberlanjutan pendidikan anak; di sisi lain, ruang fiskal rumah tangga sangat terbatas, terutama pasca-pandemi ketika banyak sektor ekonomi belum sepenuhnya pulih. Temuan tersebut selaras dengan kajian Wulan, Ahmad, dan Rochimah (2025) yang menegaskan bahwa biaya pendidikan kini mencakup spektrum yang jauh lebih luas daripada sekadar uang kuliah, biaya kuota internet, perangkat TIK, dan kegiatan penunjang belajar di luar sekolah ikut menjadi faktor pendorong peningkatan total beban biaya pendidikan, yang berimplikasi langsung pada peningkatan risiko putus sekolah dan penundaan studi, terutama pada keluarga rentan (Mentari et al., 2025). Dengan demikian, isu kenaikan biaya pendidikan bukan hanya fenomena moneter, melainkan masalah struktural yang mengancam pemenuhan hak pendidikan dan akumulasi modal manusia jangka panjang.

Pada saat yang sama, isu keadilan dan pemerataan akses pendidikan muncul sebagai konsekuensi langsung dari eskalasi biaya yang tidak diimbangi oleh desain kebijakan pembiayaan yang inklusif dan tepat sasaran. Berbagai skema bantuan seperti BOS, KIP, dan beasiswa daerah belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan biaya yang ditanggung langsung oleh peserta didik, baik di sekolah negeri maupun swasta, disparitas antar wilayah dan antar status kelembagaan membuat peserta didik di daerah tertinggal dan sekolah swasta kecil berada pada posisi yang lebih rentan terhadap eksklusi pendidikan (Aprillianoni & Ali Jimale, 2023). Kenaikan biaya pendidikan memiliki implikasi sosial ekonomi yang luas, antara lain memperdalam ketimpangan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, membatasi mobilitas sosial vertikal, serta memperbesar peluang reproduksi kemiskinan antar generasi melalui terhambatnya peningkatan kualifikasi pendidikan angkatan kerja muda (Mentari et al., 2025). Dalam konteks inilah, isu-isu kenaikan biaya pendidikan menjadi sangat relevan untuk dikaji secara sistematis melalui pendekatan systematic literature review, guna memetakan pola hubungan antara dinamika pembiayaan pendidikan, distribusi kesempatan pendidikan, dan dampaknya terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sekaligus menyediakan landasan bukti bagi perumusan kebijakan pembiayaan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu mengenai kenaikan biaya dan pembiayaan pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah mengidentifikasi berbagai dimensi persoalan, namun masih bersifat terfragmentasi. Arsal & Hidayat (2024) melalui kajian kepustakaan menelaah problem pembiayaan pendidikan secara makro dan menegaskan bahwa kenaikan biaya pendidikan berlangsung di hampir semua jenjang, dengan tekanan utama pada komponen biaya langsung dan tidak langsung yang ditanggung rumah tangga, fokus kajian ini lebih banyak pada pemetaan sumber masalah dan implikasi umum terhadap akses pendidikan, tanpa mengurai secara rinci pola dampak sosial ekonomi lintas kelompok pendapatan dan wilayah. Sementara itu, Wulan, Ahmad, dan Rochimah (2025) mengkaji kenaikan biaya pendidikan dan implikasinya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan pendekatan studi literatur, dan menunjukkan bahwa keluarga berpenghasilan rendah menanggung beban paling besar, terutama akibat perluasan komponen biaya terkait digitalisasi pembelajaran; namun, kajian ini belum menyusun sintesis tematik yang sistematis mengenai determinan kenaikan biaya dan belum mengaitkan secara eksplisit temuan-temuan literatur dengan kerangka ketimpangan struktural dan mobilitas sosial (Mentari et al., 2025). Konsep dan praktik pembiayaan pendidikan di Indonesia, termasuk sumber, mekanisme, serta permasalahan implementatif di lembaga pendidikan Islam, tetapi pembahasannya lebih menekankan aspek konseptual dan tata kelola, bukan analisis hubungan kausal antara eskalasi biaya dan konsekuensi sosial ekonomi pada tingkat rumah tangga maupun pasar kerja (Asichul & Toha Ma'sum, 2025).

Jika dicermati secara kritis, rangkaian penelitian tersebut masih menyisakan sejumlah kesenjangan yang penting untuk dijawab melalui kajian yang lebih terstruktur. Pertama, sebagian besar studi masih berdiri sendiri-sendiri, ada yang menekankan pemetaan masalah pembiayaan, ada yang mengulas implikasi sosial ekonomi, dan ada pula yang berfokus pada konsep dan strategi pembiayaan, tetapi belum banyak upaya mengintegrasikan keseluruhan temuan itu ke dalam satu sintesis komprehensif berbasis systematic literature review yang mengikuti prosedur seleksi dan analisis yang transparan. Kedua, kajian terdahulu umumnya belum mengaitkan secara sistematis dinamika kenaikan biaya pendidikan dengan indikator ketimpangan akses, risiko putus sekolah, dan peluang mobilitas sosial lintas kelompok pendapatan, wilayah, dan jenis lembaga pendidikan (negeri–swasta, umum–keagamaan) secara bersamaan, hubungan tersebut kerap hanya disebut secara deskriptif, bukan dianalisis sebagai pola tematik yang teruji. Ketiga, literatur yang ada masih relatif terbatas dalam menilai sejauh mana kebijakan dan skema pembiayaan benar-benar berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap eskalasi biaya dan ketidaksetaraan akses. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang menegaskan urgensi penelitian dengan pendekatan systematic literature review mengenai kenaikan biaya pendidikan di Indonesia dan implikasi sosial ekonominya, agar diperoleh peta pengetahuan yang lebih terstruktur sekaligus dasar empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kenaikan biaya pendidikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang sistematis dan berkelanjutan di seluruh jenjang, sekaligus menimbulkan tekanan baru bagi rumah tangga berpendapatan rendah maupun menengah. Kajian studi pustaka mengenai pembiayaan pendidikan menunjukkan bahwa komponen biaya Pendidikan baik biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan, maupun biaya personal yang ditanggung peserta didik, mengalami kenaikan yang konsisten, dengan laju inflasi pendidikan yang diperkirakan berkisar 10–15 persen per tahun dan melampaui inflasi umum, sehingga beban pengeluaran pendidikan dalam struktur belanja rumah tangga semakin besar dibandingkan kebutuhan lain (Andriani et al., 2023) (Arsal & Hidayat, 2024). Meskipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN/APBD untuk sektor pendidikan, serta adanya skema dana BOS, BOSDA, dan berbagai program bantuan lain, studi tentang pembiayaan pendidikan di sekolah dasar dan menengah menunjukkan bahwa subsidi pemerintah belum mampu menutup seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang harus dibayar orang tua, sehingga pungutan untuk seragam, buku, kegiatan ekstrakurikuler, transportasi, hingga iuran pembangunan sekolah tetap tinggi dan kerap dirasakan memberatkan (Sari & Wibowo, 2024). Dalam konteks ini, hasil telaah mutakhir memperlihatkan bahwa kenaikan biaya yang tidak diimbangi peningkatan daya beli rumah tangga berkontribusi pada meningkatnya angka putus sekolah di berbagai jenjang, terutama di SD, SMA, dan SMK, dimana banyak peserta didik terpaksa menghentikan sekolah atau menunda kelanjutan studi karena keluarga tidak mampu lagi membayar iuran rutin maupun biaya tambahan lainnya.

Dampak sosial ekonomi dari tren kenaikan biaya pendidikan tersebut terlihat dalam menguatnya segmentasi akses pendidikan berdasarkan kelas sosial, terutama ketika rumah tangga miskin dan kelompok rentan harus memilih antara memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dengan mempertahankan anak tetap bersekolah. Studi tentang mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah lebih sering menarik anak untuk bekerja membantu ekonomi rumah tangga, sementara sebagian sekolah masih menerapkan praktik seperti penahanan ijazah atau pembatasan hak mengikuti ujian bagi siswa yang menunggak pembayaran, sehingga reproduksi kemiskinan antargenerasi menjadi semakin sulit diputus (Sari & Wibowo, 2024). Pada saat yang sama, kelompok kelas menengah menghadapi fenomena "*squeezed middle*": mereka tidak tergolong miskin sehingga tidak

Copyright © 2025 The Author(s)

memenuhi syarat menerima bantuan pendidikan yang berbasis kriteria kemiskinan, tetapi juga tidak cukup sejahtera untuk menanggung kenaikan biaya sekolah, UKT, dan berbagai "biaya tersembunyi" (biaya transportasi, kursus tambahan, gadget, dan biaya hidup di kota pendidikan) tanpa tekanan finansial yang berat (Nagara & Rizal, 2025). Analisis terbaru terhadap beban biaya pendidikan kelas menengah memperlihatkan bahwa porsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar (pangan dan perumahan) cenderung meningkat, sementara ruang fiskal untuk investasi pendidikan menyempit, mendorong banyak keluarga bergantung pada utang konsumtif dan mengurangi kapasitas menabung untuk biaya pendidikan jangka panjang. Kondisi ini tidak hanya membatasi mobilitas sosial ke atas melalui pendidikan, tetapi juga berpotensi menghambat pembentukan modal manusia berkualitas yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan pencapaian agenda "Indonesia Emas 2045", sehingga isu kenaikan biaya pendidikan pada hakikatnya merupakan persoalan struktural dalam pembangunan sosial ekonomi nasional, bukan sekadar masalah teknis di tingkat sekolah.

Studi melalui pendekatan literature review menunjukkan bagaimana eskalasi biaya langsung dan tidak langsung, termasuk biaya teknologi digital pasca pandemi, memperdalam ketimpangan akses dan memperburuk kerentanan rumah tangga berpendapatan rendah, sekaligus menyoroti dimensi kesenjangan digital dan eksklusivitas pendidikan tinggi (Mentari et al., 2025). Namun kajian tersebut belum secara eksplisit menyusun sintesis lintas level yang mempertemukan bukti tentang beban biaya di tingkat rumah tangga, desain kebijakan pembiayaan publik, dan konsekuensi sosial ekonomi jangka panjang dalam satu kerangka analitis yang terstruktur. Di sisi lain, peningkatan belanja pendidikan pemerintah daerah dapat menurunkan sebagian komponen pengeluaran pendidikan rumah tangga menurut kelompok pendapatan, tetapi belum mengaitkan temuan tersebut dengan dinamika partisipasi sekolah, peluang mobilitas sosial, dan risiko reproduksi kemiskinan antargenerasi yang muncul ketika biaya pendidikan terus meningkat (Ayu & Qibthiyyah, 2023). Temuan ini diperkuat membuktikan bahwa belanja publik pada pendidikan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara agregat, namun tanpa pemetaan rinci mengenai siapa kelompok yang relatif diuntungkan dan siapa yang tetap termarginalisasi ketika struktur biaya pendidikan bergeser dari negara ke rumah tangga (Dosinta et al., 2024). Dengan demikian, literatur mutakhir masih cenderung terfragmentasi antara kajian biaya dan pembiayaan pendidikan, kajian ketimpangan sosial, dan kajian kesejahteraan, sehingga kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana kenaikan biaya pendidikan bekerja sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya terjawab.

Penelitian ini mengonstruksi peta pengetahuan yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: pertama, dinamika beban biaya pendidikan di tingkat rumah tangga, mencakup biaya langsung, biaya tersembunyi, dan biaya digital yang mengemuka pasca pandemi; kedua, konfigurasi kebijakan pembiayaan dan belanja public, meliputi BOS, PIP, KIP Kuliah, skema UKT, dan program pendidikan gratis, serta konsistensinya dengan prinsip keadilan distribusi; ketiga, konsekuensi sosial ekonomi yang terukur, seperti partisipasi sekolah, kerentanan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan peluang mobilitas sosial. Dengan memadukan bukti mikro tentang relasi belanja pemerintah dan pengeluaran rumah tangga sebagaimana ditunjukkan Ayu & Qibthiyyah (2023) dengan temuan makro mengenai kontribusi belanja pendidikan terhadap kesejahteraan, penelitian ini mengembangkan kerangka analitis yang menafsirkan kenaikan biaya pendidikan bukan sekadar isu fiskal, melainkan proses kumulatif yang menghasilkan "kerugian sosial" lintas generasi dan mempersempit ruang mobilitas (Do et al., 2025) (Dosinta et al., 2024). Dengan cara ini, penelitian menawarkan tipologi baru mekanisme transmisi antara kenaikan biaya pendidikan dan dampak sosial-ekonomi, memetakan celah intervensi kebijakan yang selama ini kurang tersentuh, serta merumuskan agenda reformasi pembiayaan pendidikan

yang lebih berkeadilan dan berbasis bukti dalam konteks Indonesia, sehingga memberikan landasan analitis yang lebih tajam bagi perumusan kebijakan maupun pengembangan riset lanjutan di bidang ekonomi pendidikan.

Kebaruan utama artikel ini terletak pada cara memposisikan kenaikan biaya pendidikan bukan sekadar sebagai fenomena keuangan rumah tangga atau isu kebijakan sektoral, tetapi sebagai mekanisme kunci yang menghubungkan desain pendanaan pendidikan dengan berbagai konsekuensi sosial-ekonomi lintas level, rumah tangga, pasar kerja, dan dinamika ketimpangan antar-kelompok. Studi Wulan dkk. (2025) telah mengulas dampak makro peningkatan biaya pendidikan terhadap ketimpangan dan kemiskinan dengan pendekatan kajian literatur yang bersifat deskriptif, sementara Rahmania & Sirozi (2025) memfokuskan diri pada dampak kenaikan UKT terhadap akses ke perguruan tinggi negeri dan potensi eksklusi mahasiswa dari kelompok berpenghasilan rendah. Di sisi lain, kajian Nursamsu dkk. (2021) menunjukkan bagaimana disparitas sosial-ekonomi memperlebar kesenjangan keterlibatan belajar selama pandemi melalui biaya terselubung pembelajaran daring (gawai, kuota internet, dan sarana belajar di rumah), sedangkan penelitian mengenai perilaku pengeluaran rumah tangga dan investasi pendidikan anak memperlihatkan adanya *trade-off* antara alokasi dana pendidikan dan kebutuhan lain, termasuk perlindungan hari tua (Oktavina & Wisana, 2025).

Penelitian ini menawarkan kebaruan, baik yang berfokus pada biaya langsung (SPP/UKT, iuran sekolah) maupun biaya tidak langsung (transportasi, akomodasi, perangkat digital, les privat), lalu memetakan secara eksplisit jalur-jalur pengaruhnya terhadap kemiskinan, ketimpangan pendidikan, mobilitas sosial antargenerasi, serta kualitas modal manusia. Pendekatan ini melampaui studi sebelumnya dengan mengintegrasikan bukti mikro tingkat rumah tangga, temuan meso di satuan pendidikan, dan bukti makro mengenai belanja pendidikan publik serta ketimpangan pendidikan antarprovinsi (Agung Suwandaru et al., 2022) (Setyadi, 2022), untuk kemudian dirangkai dalam sebuah kerangka konseptual yang menempatkan kenaikan biaya pendidikan sebagai variabel mediasi penting antara kebijakan pembiayaan, perilaku alokasi pengeluaran rumah tangga, dan luaran sosial-ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya merangkum temuan yang tersebar, tetapi juga mengisi kekosongan sintesis teoretis dan empiris tentang bagaimana "krisis keterjangkauan" pendidikan di Indonesia terbentuk, bekerja, dan berpotensi direduksi melalui desain kebijakan yang lebih berkeadilan.

Pentingnya penelitian tentang "Analisis Kenaikan Biaya Pendidikan di Indonesia: Implikasi Sosial Ekonomi" berangkat dari ketegangan antara mandat konstitusi yang menjamin hak setiap warga atas pendidikan dan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% APBN untuk sektor Pendidikan dengan realitas lapangan di mana rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan rentan, menghadapi beban biaya pendidikan yang terus meningkat dan semakin kompleks. Analisis yang menggunakan data BPS menunjukkan kecenderungan naiknya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan indikasi melebar-sempitnya akses pendidikan seiring dinamika biaya, sementara Rahmania & Sirozi (2025) memperlihatkan bagaimana kenaikan UKT berpotensi menekan partisipasi perguruan tinggi dan mendorong mahasiswa miskin ke risiko putus kuliah, pengangguran, bahkan masalah kesehatan mental akibat tekanan finansial. Biaya terselubung pembelajaran jarak jauh memperdalam jurang kesenjangan pembelajaran antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu (Nursamsu et al., 2021). Studi-studi tentang belanja publik pendidikan dan ketimpangan menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum otomatis berujung pada akses dan hasil belajar yang merata (Fitria Arina Suhendar et al., 2024). Dalam konteks global, UNESCO (2024) menegaskan bahwa investasi pendidikan yang tidak memadai dan tidak adil akan memperdalam krisis ketimpangan dan mengancam masa depan generasi muda (Efendi & Aini, 2025). Oleh karena itu, *systematic*

Copyright © 2025 The Author(s)

literature review ini menjadi penting sebagai dasar ilmiah untuk mendesain pembiayaan pendidikan di Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk biaya yang paling memberatkan, kelompok sosial yang paling terdampak, serta konsekuensi jangka panjangnya terhadap kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas modal manusia. Hasil sintesis ini diharapkan dapat menjadi pijakan argumentatif bagi perbaikan kebijakan UKT, skema beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, serta penataan ulang komposisi belanja pendidikan publik agar lebih berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan, sehingga janji konstitusional tentang pendidikan sebagai hak setiap warga negara tidak tereduksi menjadi sekadar wacana normatif.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain *systematic literature review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif-interpretatif untuk mensintesiskan secara kritis berbagai temuan tentang kenaikan biaya pendidikan dan implikasi sosial ekonominya di Indonesia. SLR dipilih karena memungkinkan penelusuran literatur secara terstruktur, transparan, dan replikabel, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak sekadar bersifat naratif, tetapi didasarkan pada prosedur seleksi dan analisis yang dapat diaudit. Penelusuran literatur dilakukan pada beberapa basis data daring dan portal jurnal, antara lain Google Scholar, DOAJ, SINTA, Garuda, serta repositori jurnal perguruan tinggi di Indonesia, yang dilengkapi dengan telaah dokumen resmi lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta organisasi internasional yang relevan. Rentang waktu publikasi dibatasi pada periode 2019–2025 untuk memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan merepresentasikan perkembangan terkini, khususnya pasca-pandemi ketika komponen biaya digital menjadi semakin menonjol. Kata kunci yang digunakan antara lain "biaya pendidikan", "pembiayaan pendidikan", "kenaikan biaya pendidikan", "*education cost*", "*tuition fee*/UKT", "*household education expenditure*", dan "*socio-economic implications*", yang dikombinasikan dengan kata "Indonesia" baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris.

"Populasi" dalam konteks penelitian ini adalah seluruh publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan yang membahas biaya dan pembiayaan pendidikan beserta konsekuensi sosial ekonominya di Indonesia pada periode 2019–2025. Melalui proses penelusuran awal, teridentifikasi 146 dokumen. Setelah penghapusan duplikasi dan skrining judul–abstrak berbasis relevansi topik, 52 dokumen dinilai layak untuk telaah teks penuh. Pada tahap seleksi akhir, 32 dokumen dimasukkan ke dalam korpus SLR, terdiri atas 26 artikel jurnal terindeks (baik nasional maupun internasional). Kriteria inklusi meliputi: (1) fokus geografis pada Indonesia; (2) memuat pembahasan eksplisit mengenai biaya atau pembiayaan pendidikan (biaya langsung, tidak langsung, maupun biaya digital) dan setidaknya satu indikator sosial ekonomi (kemiskinan, ketimpangan, partisipasi sekolah, mobilitas sosial, atau kesejahteraan rumah tangga); (3) terbit antara 2019–2025; (4) naskah tersedia dalam bentuk teks penuh; dan (5) merupakan artikel ilmiah yang ditelaah.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan langkah-langkah yang mengadaptasi tahapan *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Tahap pertama adalah familiarisasi, yakni membaca berulang seluruh lembar ekstraksi dan teks penuh artikel untuk memahami konteks, variasi, dan pola awal temuan. Tahap kedua adalah *open coding*, yaitu memberikan kode awal pada unit-unit makna (kalimat atau paragraf) yang memuat informasi mengenai (a) pola kenaikan dan struktur biaya pendidikan (langsung, tidak langsung, dan digital); (b) beban biaya pada tingkat rumah tangga serta strategi adaptasi keluarga; (c) implikasi sosial ekonomi seperti risiko putus sekolah, ketimpangan akses, dan mobilitas sosial; serta (d) desain dan implementasi kebijakan pembiayaan. Tahap ketiga adalah *axial coding*, yakni

mengelompokkan kode-kode yang berkerabat ke dalam kategori yang lebih abstrak, misalnya "dinamika eskalasi biaya dan komponennya", "strategi adaptasi dan tekanan fiskal rumah tangga", "ketimpangan akses dan reproduksi ketidaksetaraan", dan "peran dan keterbatasan kebijakan pembiayaan". Tahap keempat adalah *selective coding*, yaitu menyusun tema-tema utama dan menjelaskan hubungan antar tema dalam sebuah narasi konseptual yang koheren, misalnya bagaimana pergeseran struktur pembiayaan dari negara ke rumah tangga membentuk mekanisme seleksi sosial terhadap akses pendidikan. Validitas internal diperkuat melalui *constant comparison* antar studi, pencarian temuan yang saling menguatkan maupun yang menyimpang, serta penelusuran kembali ke teks asli ketika terdapat keraguan pada kategorisasi. Hasil akhirnya adalah peta tema yang menjadi landasan penyusunan bagian hasil dan pembahasan.

Tabel 1. Ringkasan Literatur Kunci yang Direview

No	Penulis	Tahun	Topik Utama	Temuan Kunci
1	Arsal & Hidayat	2024	Masalah pembiayaan dan kenaikan biaya pendidikan di Indonesia	Menunjukkan kenaikan biaya pendidikan lintas jenjang, beban biaya langsung dan tidak langsung rumah tangga meningkat sistematis.
2	Mentari et al.	2025	Kenaikan biaya pendidikan dan implikasi sosial ekonomi	Menjelaskan bahwa eskalasi biaya, termasuk biaya digital, memperdalam ketimpangan akses dan meningkatkan risiko putus sekolah.
3	Sari & Wibowo	2024	Problematika mahalnya biaya pendidikan	Menggambarkan pungutan resmi dan tidak resmi di sekolah yang menambah beban biaya dan memicu eksklusi keluarga miskin.
4	Ayu & Qibthiyyah	2023	Pengeluaran pemerintah daerah dan rumah tangga untuk pendidikan	Menemukan bahwa peningkatan belanja publik dapat menurunkan sebagian beban rumah tangga, tetapi dampaknya tidak merata antar kelompok pendapatan.
5	Nagara & Rizal	2025	Beban biaya pendidikan kelas menengah	Mengidentifikasi fenomena "kelas menengah terjepit" yang tidak menerima bantuan, tetapi terbebani kenaikan biaya sekolah dan kuliah.
6	Rahmania & Sirozi	2025	Dampak kenaikan UKT terhadap akses ke perguruan tinggi negeri	Menunjukkan bahwa kenaikan UKT berpotensi menurunkan partisipasi mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah dan meningkatkan risiko putus kuliah.
7	Nursamsu et al.	2021	Disparitas sosial ekonomi dan keterlibatan belajar di masa pandemi	Memperlihatkan bahwa biaya terselubung pembelajaran daring (gawai, kuota, perangkat) memperlebar kesenjangan keterlibatan belajar.
8	Harahap et al.	2025	Pengaruh biaya pendidikan terhadap	Menunjukkan biaya pendidikan sebagai variabel penting dalam

Copyright © 2025 The Author(s)

			keputusan memilih sekolah menengah	keputusan orang tua memilih sekolah, terutama bagi rumah tangga rentan.
9	Dosinta et al.	2024	Belanja publik dan kesejahteraan masyarakat	Menemukan bahwa belanja publik pendidikan berkontribusi positif pada kesejahteraan agregat, tetapi tidak otomatis mengurangi beban biaya pribadi.
10	Setyadi	2022	Belanja pemerintah dan ketimpangan pendidikan di Indonesia	Menunjukkan bahwa struktur dan distribusi belanja pendidikan memengaruhi ketimpangan akses pendidikan antar daerah dan kelompok sosial ekonomi.

Hasil

Sintesis terhadap artikel yang memenuhi kriteria inklusi menunjukkan pola yang konsisten bahwa kenaikan biaya pendidikan di Indonesia berlangsung sistematis di seluruh jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hasil pemetaan tematik mengindikasikan bahwa eskalasi biaya tidak hanya tercermin dalam komponen uang pangkal, SPP, atau UKT, tetapi juga dalam berbagai pungutan lain yang dilekatkan pada layanan pendidikan, sehingga total biaya yang ditanggung rumah tangga meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan mereka. Pola ini menguat pada periode pasca-pandemi, ketika kebutuhan akan perangkat digital dan konektivitas internet menjadi prasyarat partisipasi belajar, sehingga beban biaya pendidikan mengalami perluasan dari sekadar pengeluaran di lingkungan sekolah ke pengeluaran rumah tangga yang berhubungan dengan teknologi dan penunjang belajar. Secara agregat, hasil kajian menegaskan bahwa kenaikan biaya pendidikan merupakan gejala struktural dari pergeseran beban pembiayaan dari negara ke rumah tangga, bukan semata konsekuensi inflasi tahunan biasa.

Hasil analisis lebih rinci terhadap komponen biaya menunjukkan bahwa beban pendidikan yang ditanggung peserta didik dan keluarga terbagi ke dalam tiga kelompok besar: biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya digital. Biaya langsung mencakup uang pangkal, SPP/UKT, iuran pembangunan, dan iuran kegiatan akademik maupun nonakademik; biaya tidak langsung meliputi transportasi, seragam, buku, alat tulis, serta biaya hidup bagi peserta didik yang harus merantau; sedangkan biaya digital terkait dengan pembelian gawai, laptop, paket data, dan dukungan infrastruktur belajar di rumah. Sintesis studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa ketiga kelompok biaya ini cenderung meningkat secara simultan, dengan kontribusi biaya digital yang semakin signifikan pasca-pandemi. Di lingkungan rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah-bawah, komponen-komponen ini tidak saling menggantikan, tetapi saling menumpuk, sehingga ruang fiskal keluarga untuk pengeluaran lain di luar pendidikan menjadi semakin sempit dan rentan menimbulkan tekanan finansial berkepanjangan.

Dari sisi pemerataan, hasil kajian mengungkap bahwa kenaikan biaya pendidikan berimplikasi langsung pada ketimpangan akses dan keberlanjutan studi antar kelompok sosial ekonomi. Sebagian besar artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa rumah tangga miskin dan rentan merespons eskalasi biaya pendidikan dengan berbagai strategi adaptif yang justru berpotensi menurunkan kualitas investasi pendidikan, misalnya memindahkan anak ke sekolah yang lebih murah, mengurangi partisipasi dalam kegiatan penunjang belajar, atau bahkan menghentikan sekolah di jenjang tertentu. Di tingkat menengah dan perguruan tinggi, peningkatan biaya dikaitkan dengan peningkatan risiko putus sekolah, penundaan kelanjutan

studi, serta meningkatnya keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi informal untuk membantu pendapatan keluarga. Dengan demikian, kenaikan biaya pendidikan berfungsi sebagai mekanisme seleksi yang memperlebar jarak antara kelompok yang mampu mempertahankan akses terhadap pendidikan berkualitas dan kelompok yang harus mengorbankan aspirasi pendidikan karena keterbatasan sumber daya ekonomi.

Temuan penting lainnya adalah menguatnya fenomena "kelas menengah terjepit" dalam konteks pembiayaan pendidikan. Berbagai studi yang dianalisis menggambarkan keluarga kelas menengah sebagai kelompok yang tidak termasuk kategori miskin sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan berbasis kemiskinan, namun sekaligus tidak cukup kuat secara finansial untuk menanggung kenaikan biaya sekolah dan perguruan tinggi tanpa konsekuensi terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok ini cenderung melakukan penyesuaian dengan mengurangi tabungan jangka panjang, mengambil pinjaman konsumtif, atau memilih program studi dan institusi pendidikan yang lebih murah meskipun tidak selalu sesuai dengan potensi akademik dan kebutuhan pasar kerja. Tekanan biaya ini juga berimplikasi pada munculnya kecemasan dan ketidakpastian terhadap keberlanjutan investasi pendidikan anak, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi kemampuan kelas menengah untuk menjalankan peran strategisnya sebagai penggerak mobilitas sosial vertikal dan penyangga stabilitas ekonomi nasional.

Dari sisi kebijakan publik, hasil ini menunjukkan bahwa berbagai skema pembiayaan seperti BOS, BOSDA, PIP, KIP, KIP Kuliah, program pendidikan gratis, dan kebijakan penyesuaian UKT memang berkontribusi mengurangi sebagian beban biaya langsung, tetapi belum secara tuntas mengatasi persoalan keterjangkauan pendidikan. Pola yang berulang dalam artikel-artikel yang direview adalah masalah ketepatan sasaran, keterbatasan cakupan, dan lemahnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana. Di banyak satuan pendidikan, bantuan yang diterima belum mampu menutup biaya tidak langsung dan biaya digital yang justru menjadi sumber tekanan utama bagi rumah tangga miskin dan rentan. Selain itu, beberapa studi menyoroti bahwa rancangan kebijakan pembiayaan cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan fiskal institusi pendidikan daripada kemampuan bayar rumah tangga, sehingga penetapan UKT dan berbagai jenis pungutan sering kali dipersepsikan sebagai kebijakan yang kurang adil dan memicu protes publik.

Analisis lintas wilayah dan jenis lembaga pendidikan juga mengungkapkan adanya variasi signifikan dalam intensitas beban biaya dan dampaknya terhadap struktur kesempatan pendidikan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa peserta didik di daerah tertinggal, sekolah swasta kecil, dan lembaga pendidikan keagamaan menghadapi kombinasi tantangan yang lebih kompleks, berupa biaya unit pendidikan yang relatif tinggi, dukungan fiskal yang terbatas, dan rendahnya kapasitas kelembagaan untuk mengakses sumber pendanaan alternatif. Di wilayah perkotaan, meskipun pilihan sekolah lebih beragam, eskalasi biaya seringkali berjalan beriringan dengan komersialisasi layanan pendidikan dan kompetisi simbolik antar sekolah, sehingga orang tua harus menanggung biaya tambahan untuk les privat, kursus, dan berbagai bentuk "pengayaan" yang dianggap perlu untuk menjaga daya saing anak. Di sisi lain, kesenjangan digital memperparah ketidaksetaraan antara sekolah dan rumah tangga yang memiliki akses infrastruktur teknologi memadai dengan yang tidak, terutama ketika pembelajaran jarak jauh atau hybrid menjadi praktik rutin.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memetakan dengan cukup jelas mekanisme transmisi antara kenaikan biaya pendidikan dan implikasi sosial ekonominya di Indonesia. Kenaikan biaya, baik langsung maupun tidak langsung, terbukti meningkatkan proporsi pengeluaran pendidikan dalam struktur belanja rumah tangga, menekan kemampuan keluarga miskin dan kelas menengah dalam mempertahankan partisipasi pendidikan, dan pada saat yang

Copyright © 2025 The Author(s)

sama memperkuat stratifikasi akses berdasarkan status sosial ekonomi. Di tingkat makro, pola ini berpotensi menghambat pembentukan modal manusia berkualitas, memperlambat mobilitas sosial vertikal, dan memperdalam ketimpangan pendapatan antar generasi. Sintesis temuan dari berbagai studi yang ditelaah menegaskan bahwa kenaikan biaya pendidikan bukan sekadar isu teknis pengelolaan anggaran sekolah atau perguruan tinggi, melainkan persoalan struktural yang berkaitan erat dengan desain kebijakan pembiayaan, kapasitas negara dalam melindungi kelompok rentan, serta arah pembangunan sosial ekonomi jangka panjang.

Pembahasan

Secara umum, sintesis kajian menunjukkan bahwa kenaikan biaya pendidikan di Indonesia bukan sekadar gejala inflasi rutin, melainkan manifestasi pergeseran struktur pembiayaan dari negara ke rumah tangga, dengan konsekuensi sosial ekonomi yang luas. Data BPS yang dirangkum oleh Wulan dkk. menunjukkan bahwa porsi pengeluaran pendidikan dalam total konsumsi rumah tangga meningkat dari sekitar 1,9% pada 2010 menjadi lebih dari 3,2% pada 2022, dengan komposisi biaya langsung (SPP, iuran pembangunan, biaya praktik, ujian) dan biaya tidak langsung (transportasi, buku, seragam, gawai, kuota internet) yang kian kompleks. Kajian Sari dan Wibowo memperlihatkan bahwa kenaikan biaya tersebut dirasakan lintas jenjang, mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dan terbukti menekan kemampuan partisipasi pendidikan keluarga berpendapatan rendah dan menengah. Arsal menegaskan bahwa lonjakan biaya kerap tidak diikuti perbaikan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran sekolah, sehingga rumah tangga menanggung beban ganda, kewajiban membayar berbagai pungutan dan ketidakpastian terhadap kualitas layanan pendidikan yang diterima. Dalam perspektif sosial ekonomi, pola ini berdampak pada meningkatnya risiko putus sekolah, pengalihan anggaran rumah tangga dari kebutuhan dasar (pangan, kesehatan, perumahan) ke biaya sekolah, serta menguatnya stratifikasi akses pendidikan antara kelompok mampu dan tidak mampu.

Secara lebih rinci, tantangan dan hambatan kenaikan biaya pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam sedikitnya tiga dimensi: pertama, keterbatasan kapasitas fiskal negara dan desain kebijakan yang masih mendorong kontribusi tinggi dari rumah tangga; kedua, tata kelola pembiayaan yang belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan berpihak pada kelompok rentan; ketiga, kelemahan desain skema bantuan yang belum benar-benar berbasis kebutuhan. Wulan dkk. menunjukkan bahwa program seperti PIP, KIP Kuliah, dan BOS memang mengurangi sebagian beban, tetapi implementasinya masih terkendala distribusi, sosialisasi, dan ketepatan sasaran. Sari dan Wibowo menggarisbawahi keberadaan biaya “terselubung” (seragam, kegiatan sekolah, les tambahan, kontribusi komite) yang tidak tercakup secara memadai dalam skema bantuan dan justru menjadi sumber eksklusi sosial bagi keluarga miskin. Hubungan kenaikan biaya pendidikan dengan skeptisisme masyarakat menambah bukti bahwa kenaikan biaya yang berulang dan kurang dikomunikasikan memadai memicu erosi kepercayaan publik terhadap sekolah dan pemerintah (Setiawan et al., 2023). Di sisi lain, penelitian tentang transformasi model pembiayaan, misalnya skema bebas biaya bagi kelompok miskin, beasiswa berbasis kebutuhan, *endowment* pendidikan, dan kemitraan publik–swasta, menunjukkan adanya peluang rekayasa kebijakan yang lebih inklusif, selama pemerintah berani mereposisi peran negara dari sekadar “penyedia subsidi” menjadi perancang arsitektur pembiayaan yang menjamin akses pendidikan sebagai hak warga negara (Darmawan & Rugaiyah, 2024) (Lorensius & Ping, 2021).

Temuan utama menegaskan hipotesis bahwa kenaikan biaya pendidikan berkontribusi signifikan terhadap reproduksi ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan kelas menengah rentan. Kombinasi besaran biaya pendidikan dan

kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh nyata terhadap keputusan siswa memilih sekolah dan keberlanjutan studi, keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas cenderung mengarahkan anak ke sekolah yang lebih murah atau berhenti di jenjang yang lebih rendah (Murti & Hadi, 2019). Sejalan dengan itu, uang sekolah merupakan prediktor penting tingkat pendidikan anak di Indonesia, ketika biaya sekolah meningkat tanpa diimbangi dukungan finansial, peluang anak dari keluarga miskin untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu menurun signifikan, meskipun faktor usia dan gender sudah dikendalikan (Isnawati & Sholeh, 2022). Ketika hasil-hasil ini dibaca bersama gambaran nasional yang mencatat peningkatan tajam pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan menguatnya komponen biaya tidak langsung, makna utama temuan ini adalah bahwa biaya pendidikan bekerja sebagai mekanisme seleksi struktural yang menentukan siapa yang dapat terus menikmati pendidikan bermutu dan siapa yang tertinggal.

Secara substantif, hasil sintesis juga menunjukkan menguatnya pola "*squeezed middle*" yang dialami keluarga kelas menengah di Indonesia, tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan berbasis kemiskinan, namun tidak cukup kuat secara finansial untuk mengakses pendidikan bermutu tanpa pengorbanan besar. Kelas menengah ini berada pada posisi rentan, karena beban biaya pendidikan yang terus meningkat memaksa mereka mengurangi tabungan, menambah utang konsumtif, atau menurunkan pilihan mutu sekolah dan perguruan tinggi bagi anak-anak mereka (Nagara & Rizal, 2025). Di sisi lain, bukti tentang pengalihan pengeluaran rumah tangga dari kebutuhan dasar ke biaya Pendidikan, baik pada konteks sekolah maupun perguruan tinggi selama pandemi menunjukkan bahwa investasi pendidikan sering dilakukan dengan mengorbankan dimensi kesejahteraan lain, seperti kesehatan dan nutrisi (Junaris Situmorang et al., 2022). Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya memaknai biaya pendidikan bukan sekadar sebagai variabel ekonomi, melainkan sebagai simpul yang menghubungkan struktur kesempatan pendidikan, ketahanan rumah tangga, dan prospek pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini pada dasarnya konsisten, tetapi menawarkan cakupan tema dan kedalaman integrasi yang lebih luas lintas jenjang pendidikan. Studi Situmorang dkk. tentang biaya kuliah saat pandemi Covid-19 pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UPR, misalnya, menunjukkan bahwa komponen biaya langsung (UKT, kegiatan, tugas) dan tidak langsung (biaya hidup, kuota internet, kesehatan) mengalami peningkatan dan menggeser pola pengeluaran mahasiswa serta keluarga mereka. Kajian Lorensius dan Ping tentang model pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi selama pandemi menegaskan bahwa struktur pembiayaan di Indonesia masih bertumpu pada pembagian beban antara pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan bayar rumah tangga, sehingga setiap guncangan ekonomi segera diterjemahkan menjadi tekanan biaya pada peserta didik. Sementara itu, penelitian Harahap pada level pendidikan menengah memperlihatkan bahwa biaya pendidikan, bersama variabel lokasi dan citra sekolah, berpengaruh signifikan terhadap minat siswa melanjutkan studi, menguatkan temuan bahwa biaya merupakan penghalang utama keberlanjutan pendidikan bagi banyak keluarga (Harahap et al., 2025).

Keunggulan temuan ini terletak pada kemampuannya mensintesiskan bukti lintas studi dan lintas jenjang untuk memperlihatkan konsistensi pola kenaikan biaya dan dampak sosial-ekonominya, di tengah variasi konteks institusional. Sari dan Wibowo memotret secara kualitatif problematika mahalnya biaya pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah, dengan tekanan pada pengalaman keluarga dan siswa dalam menghadapi berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi. Arsal menyoroti aspek tata kelola dan efisiensi pembiayaan, menekankan bahwa kenaikan biaya seringkali terkait kelemahan perencanaan anggaran, kurangnya transparansi, dan

Copyright © 2025 The Author(s)

ketidakmerataan dukungan pemerintah antara sekolah negeri dan swasta. Wulan dkk. kemudian mengintegrasikan berbagai temuan tersebut dalam gambaran nasional mengenai pergeseran pola pembiayaan, meningkatnya komponen biaya tidak langsung, dan keterbatasan efektivitas program bantuan pendidikan. Dibandingkan studi-studi tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi tren kenaikan biaya, tetapi juga secara eksplisit menghubungkannya dengan dinamika kebijakan terbaru, protes publik atas kenaikan UKT, serta perubahan kebutuhan teknologi pembelajaran, sehingga menghasilkan peta komparatif yang lebih komprehensif mengenai posisi Indonesia dalam agenda pemerataan kesempatan Pendidikan.

Dari sisi praktis, temuan penelitian ini mengisyaratkan perlunya rekonstruksi arsitektur pembiayaan pendidikan yang lebih progresif, berkeadilan, dan adaptif terhadap guncangan ekonomi. Literatur tentang model pembiayaan dan efektivitas pembiayaan pendidikan menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada kontribusi rumah tangga tanpa mekanisme proteksi sosial yang memadai akan memperdalam eksklusi pendidikan bagi kelompok rentan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga Pendidikan (Hidayat et al., 2023). Rekomendasi tentang reformasi pembiayaan berbasis hasil, penguatan data penerima bantuan, serta perbaikan tata kelola program PIP, KIP Kuliah, dan BOS dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret berupa desain UKT yang benar-benar mempertimbangkan kemampuan bayar (*ability to pay*), perluasan beasiswa berbasis kebutuhan (*need-based scholarship*), dan penataan ulang porsi pendanaan pusat–daerah–masyarakat agar sekolah dan perguruan tinggi yang melayani kelompok miskin tidak dipaksa mengkompensasi kekurangan anggaran melalui pungutan kepada peserta didik. Studi Darmawan dan Rugaiyah tentang transformasi model pembiayaan di PKBM melalui penghapusan iuran bagi peserta didik memberikan bukti bahwa skema pembiayaan yang dirancang eksplisit untuk aksesibilitas dapat memperluas partisipasi pendidikan orang dewasa dan kelompok putus sekolah, sehingga relevan sebagai rujukan bagi kebijakan pendidikan nonformal dan kesetaraan.

Dari perspektif teoretis, temuan ini sekaligus menguatkan dan menajamkan teori modal manusia serta teori stratifikasi pendidikan. Di satu sisi, kajian ekonomi pendidikan yang dirangkum oleh Lorensius dan Ping maupun Hidayat menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi; semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar potensi peningkatan pendapatan dan kontribusi terhadap pembangunan. Namun di sisi lain, penelitian ini memperlihatkan bahwa ketika biaya pendidikan meningkat lebih cepat dibandingkan kapasitas ekonomi rumah tangga, investasi tersebut menjadi selektif dan menghasilkan "pendidikan eksklusif", yaitu kondisi ketika akses ke pendidikan bermutu terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pola "*squeezed middle*" yang diidentifikasi Nagara dan meningkatnya skeptisisme publik terhadap kenaikan biaya pendidikan yang dicatat oleh Idrak dkk. memperkaya perdebatan teoritis dengan menambahkan dimensi keadilan distributif, kepercayaan publik, dan legitimasi kebijakan ke dalam diskursus pembiayaan pendidikan. Hal ini membuka peluang pengembangan pendekatan ekonomi politik dalam studi biaya pendidikan, dengan menyoroti bagaimana konfigurasi kekuasaan, pilihan regulasi, dan kepentingan aktor memengaruhi siapa yang pada akhirnya menanggung beban pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, analisis sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas artikel yang terbit dalam rentang 2019–2025, sehingga potensi bias publikasi tidak dapat dihindari, misalnya dominasi studi yang dipublikasikan dalam jurnal tertentu atau yang melaporkan temuan signifikan. Kedua, sebagian besar artikel yang dianalisis menggunakan desain deskriptif dan korelasional, sehingga hubungan kausal antara kenaikan biaya pendidikan dan dampak sosial ekonomi (misalnya putus sekolah, perubahan struktur pengeluaran rumah tangga, mobilitas sosial) belum dapat dipastikan

secara kuat. Ketiga, fokus geografis penelitian adalah Indonesia, dengan sumber data berupa artikel jurnal, laporan resmi, dan dokumen kebijakan; akibatnya, variasi pengalaman mikro rumah tangga menurut wilayah, jenis sekolah, gender, kelompok disabilitas, atau latar belakang budaya belum tergali secara memadai. Keempat, keterbatasan akses terhadap beberapa basis data berbayar menyebabkan sebagian kajian internasional yang relevan dengan konteks pembiayaan pendidikan di negara berkembang mungkin belum sepenuhnya tercakup. Keterbatasan-keterbatasan ini tidak meniadakan nilai temuan, tetapi menjadi catatan penting ketika hasil penelitian hendak digeneralisasikan atau dijadikan rujukan langsung bagi perumusan kebijakan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan SLR dengan studi lapangan berbasis data mikro rumah tangga dan lembaga pendidikan. Pendekatan kuantitatif dapat dikembangkan dengan pemanfaatan data Susenas, Sakernas, atau survei khusus biaya pendidikan untuk menguji secara lebih ketat pengaruh berbagai komponen biaya (SPP, transportasi, biaya teknologi, les tambahan) terhadap peluang partisipasi, keberlanjutan studi, dan transisi ke jenjang lebih tinggi. Pendekatan kualitatif dan mixed methods penting untuk menggali strategi adaptasi rumah tangga, cara keluarga mengelola prioritas pengeluaran, persepsi keadilan terhadap kebijakan UKT dan pungutan sekolah, serta pengalaman subjektif siswa dari kelompok rentan (pekerja informal, daerah tertinggal, keluarga miskin kota, penyandang disabilitas). Selain itu, studi evaluasi kebijakan terhadap program-program spesifik, seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, beasiswa daerah, maupun kebijakan penyesuaian UKT, dengan desain *quasi-eksperimental* akan membantu menilai efektivitas intervensi dalam meredam dampak kenaikan biaya pendidikan. Kajian komparatif lintas negara berpendapatan menengah juga perlu dikembangkan untuk mengidentifikasi praktik baik (*good practices*) model pembiayaan yang mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal, mutu pendidikan, dan keadilan akses.

Kesimpulan

Kenaikan biaya pendidikan di Indonesia sebagaimana terpetakan melalui kajian sistematis terhadap literatur mutakhir menunjukkan bahwa fenomena tersebut bersifat struktural, berlangsung lintas jenjang, dan tidak dapat direduksi sebagai sekadar dampak inflasi tahunan. Biaya pendidikan yang ditanggung rumah tangga membesar dalam tiga rumpun utama, yakni biaya langsung, biaya tidak langsung, serta biaya digital yang menguat pasca-pandemi. Ketiga rumpun biaya ini meningkat secara simultan dan menekan ruang fiskal rumah tangga, terutama ketika eskalasi biaya berjalan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Sintesis hasil kajian menegaskan bahwa beban pembiayaan pendidikan bergeser dari negara ke rumah tangga, dan bahwa peningkatan alokasi publik 20% APBN/APBD belum otomatis menjamin keterjangkauan biaya di tingkat satuan pendidikan maupun rumah tangga, sehingga mandat konstitusional mengenai hak atas pendidikan yang adil dan berkualitas berhadapan dengan realitas “krisis keterjangkauan” biaya pendidikan.

Implikasi sosial ekonomi dari dinamika tersebut tampak pada menguatnya ketimpangan akses, keberlanjutan studi, dan mobilitas sosial, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan. Kenaikan biaya pendidikan berkelindan dengan strategi adaptasi rumah tangga yang sering bersifat defensif: memindahkan anak ke sekolah yang lebih murah, mengurangi partisipasi dalam kegiatan penunjang belajar, menunda atau menghentikan studi, hingga mendorong anak terlibat dalam aktivitas ekonomi informal untuk menutup kekurangan biaya. Pada tingkat yang lebih luas, keluarga menghadapi *trade-off* antara alokasi dana pendidikan dan kebutuhan dasar lain seperti pangan, kesehatan, dan perumahan; kondisi ini tidak hanya dialami oleh kelompok miskin, tetapi juga oleh kelas menengah yang semakin mengalami posisi

Copyright © 2025 The Author(s)

"terjepit" karena tidak memenuhi syarat bantuan berbasis kemiskinan, namun juga tidak cukup kuat menanggung kenaikan biaya yang terus menerus. Dalam jangka panjang, pola ini menjadikan biaya pendidikan sebagai mekanisme seleksi struktural yang menentukan siapa yang mampu mengakses pendidikan bermutu dan siapa yang tertinggal, sehingga memperkuat reproduksi kemiskinan antar generasi dan menghambat pembentukan modal manusia yang dibutuhkan untuk mencapai agenda pembangunan jangka panjang.

Dari perspektif kebijakan, hasil telaah menunjukkan bahwa berbagai skema pembiayaan seperti BOS, BOSDA, PIP, KIP, KIP Kuliah, beasiswa daerah, maupun kebijakan penetapan dan penyesuaian UKT memang berkontribusi meringankan sebagian beban biaya langsung, tetapi belum mampu menjawab persoalan keterjangkauan secara menyeluruh. Masalah ketepatan sasaran, keterbatasan cakupan, disparitas antar wilayah dan jenis lembaga, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi pola berulang yang muncul dalam literatur. Biaya "terselubung" Pendidikan, mulai dari seragam, kegiatan ekstrakurikuler, iuran komite, hingga kursus tambahan, serta biaya digital pasca-pandemi relatif belum tertangani secara memadai dalam desain bantuan yang ada, sehingga tekanan utama bagi rumah tangga justru tetap bertahan. Disparitas antara kawasan perkotaan dan perdesaan, antara sekolah negeri dan swasta kecil, serta antara lembaga umum dan keagamaan menunjukkan bahwa arsitektur pembiayaan yang berlaku masih cenderung responsif terhadap kebutuhan fiskal lembaga pendidikan, alih-alih berpijak kuat pada kemampuan bayar dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, kenaikan biaya pendidikan berkelindan dengan kelemahan desain dan implementasi kebijakan pembiayaan, dan memerlukan rekonstruksi yang lebih mendasar.

Penelitian ini, yang berbasis pada systematic literature review terhadap publikasi periode 2019–2025, memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Ketergantungan pada artikel-artikel terbitan jurnal dan dokumen resmi berimplikasi pada potensi bias publikasi, misalnya dominasi studi dengan hasil signifikan atau yang berasal dari lembaga tertentu, sementara pengalaman mikro rumah tangga dan satuan pendidikan yang tidak terdokumentasi dalam publikasi ilmiah kurang terwakili. Sebagian besar studi yang direview menggunakan pendekatan deskriptif atau korelasional, sehingga hubungan kausal antara kenaikan biaya pendidikan dan luaran sosial ekonomi (putus sekolah, perubahan pola pengeluaran, mobilitas sosial) belum dapat ditegaskan secara kuat. Variasi lintas wilayah, jenis sekolah, gender, kelompok disabilitas, serta latar sosial budaya juga belum tergambar secara utuh karena keterbatasan detail laporan dalam artikel yang dikaji. Selain itu, fokus geografis pada konteks Indonesia membuat generalisasi langsung ke negara lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi kontribusi penelitian dalam memetakan pola umum dan mekanisme utama yang menghubungkan kenaikan biaya pendidikan dengan implikasi sosial ekonominya, tetapi menjadi rambu penting bagi pembacaan dan pemanfaatan hasil kajian ini dalam perumusan kebijakan.

Bertolak dari temuan dan keterbatasan tersebut, rekomendasi pada aras kebijakan dan tata kelola pembiayaan pendidikan diarahkan pada rekonstruksi arsitektur pendanaan yang lebih progresif, berkeadilan, dan adaptif. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat peran negara dalam menanggung biaya pendidikan esensial dengan mengurangi ketergantungan pada kontribusi rumah tangga, terutama bagi kelompok miskin dan kelas menengah rentan. Penetapan UKT dan berbagai pungutan pendidikan seharusnya didasarkan pada prinsip *ability to pay* dengan instrumen verifikasi yang transparan dan berbasis data terpadu, sehingga komponen biaya inti tidak menjadi penghalang akses. Program BOS, PIP, KIP Kuliah, dan beasiswa daerah perlu diperluas cakupan dan diperbaiki mekanisme targeting-nya agar lebih sensitif terhadap dimensi kerentanan baru, termasuk beban biaya digital pasca-pandemi. Regulasi mengenai pungutan dan biaya tambahan di sekolah maupun perguruan tinggi perlu

diperketat dengan standar transparansi dan partisipasi publik, sehingga biaya "terselubung" dapat diminimalisir. Pada saat yang sama, kebijakan belanja pendidikan publik harus mengintegrasikan strategi pengurangan kesenjangan digital, misalnya melalui dukungan perangkat dan konektivitas bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, sehingga dimensi biaya teknologi tidak terus menjadi sumber eksklusi baru.

Pada aras praktis dan riset lanjutan, rekomendasi diarahkan pada penguatan basis bukti dan inovasi skema pembiayaan yang berpihak pada kelompok rentan tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal. Penelitian selanjutnya perlu memadukan SLR dengan analisis data mikro rumah tangga (misalnya Susenas, Sakernas, survei biaya pendidikan khusus) dan studi lapangan di berbagai tipe lembaga pendidikan untuk menguji secara lebih ketat pengaruh masing-masing komponen biaya terhadap partisipasi dan keberlanjutan studi. Desain quasi-eksperimental atau evaluasi dampak program (*impact evaluation*) penting dikembangkan untuk menilai efektivitas kebijakan dan program bantuan spesifik seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, serta kebijakan penyesuaian UKT, sehingga rekomendasi perbaikan berbasis pada temuan empiris yang kuat. Pada level satuan pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi didorong mengoptimalkan efisiensi internal, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana, dan mengembangkan skema subsidi silang maupun kemitraan publik–swasta yang tidak membebani peserta didik. Keterlibatan masyarakat sipil, organisasi profesi, dan media dalam mengawasi praktik pembiayaan serta mengadvokasi keadilan akses juga perlu diperkuat. Dengan demikian, upaya meredam dampak kenaikan biaya pendidikan tidak hanya bergantung pada satu aktor, tetapi menjadi agenda kolektif yang menautkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam kerangka pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

References

Agung Suwandaru, Alghamdi, T., & Nurwanto, N. (2022). Empirical Analysis on Public Expenditure for Education, Human Capital and Economic Growth: Evidence from Honduras. *Economies*, *10*(10), 1–13. https://doi.org/10.3390/economies10100241

Andriani, R., Marlina, E., & Rahayu, N. S. (2023). The Character Education Based on Local Wisdom with Flipbook Assisted Digital Literacy Media in Online Learning. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, *4*(2), 104–109. https://doi.org/10.46336/ijqrm.v4i2.450

Aprillianoni, & Ali Jimale, F. (2023). Menjaga Akses Pendidikan Yang Adil: Tantangan Dan Solusi Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Al Marhalah*, *7*(2), 166–174.

Arsal, F. R., & Hidayat, A. (2024). Masalah Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Kenaikan Biaya Pendidikan. *Invention: Journal Research and Education Studies*, *5*(1), 1–12. https://doi.org/10.51178/invention.v5i1.1648

Asichul, & Toha Ma'sum. (2025). Analisis Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Teknik Mesin*, *5*(2), 34–45. http://journal.um.ac.id/index.php/teknik-mesin/article/view/2946

Ayu, P., & Qibthiyyah, R. (2023). Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Rumah Tangga untuk Pendidikan menurut Kelompok Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, *3*, 125–135. https://doi.org/10.11594/jesi.03.02.05

Darmawan, R., & Rugaiyah, R. (2024). Education Financing Model Transformation to Build Education Accessibility Through Free School Fees at PKBM Golden. *Advances In Social Humanities Research*, *2*(5), 755–767. https://doi.org/10.46799/adv.v2i5.242

Do, A. T. P. N., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). TINJAUAN SISTEMATIS TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS HUMAN

Copyright © 2025 The Author(s)

CAPITAL UNTUK PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DI INDONESIA. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*, 247–261.

Dosinta, N. F., Djafar, F., & Yantiana, N. (2024). The Role of Public Expenditures on Community Welfare. *Jurnal Economia*, *20*(2 SE-Articles), 260–272. https://doi.org/10.21831/economia.v20i2.47545

Efendi, M., & Aini, N. (2025). Ketimpangan Sosial Ekonomi dan Akses Pendidikan: Studi Kasus Masyarakat Marginal. *Integrating Religion, Social Economy, and Law: Conference Series*, *1*(2), 127–131. https://journal.ummat.ac.id/index.php/ics

Fitria Arina Suhendar, Ruli Vita Sari, & Trias Pangesti. (2024). *The Impact of Poverty on Education*. *8*(2), 39–47. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22807-5_4

Harahap, N., Rachmawati, I., & Handoko, Y. (2025). Pengaruh Biaya Pendidikan, Lokasi, dan Citra Sekolah Terhadap Keputusan Orang Tua Memilih Sekolah Menengah Pertama (SMP) Citra Berkat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *5*(2), 140–151. https://doi.org/10.32815/jubis.v5i2.2553

Hidayat, R., Alam, M., Halim, A. S., & Agustian, S. (2023). Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Pasca Covid-19. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *6*(2), 228–241. https://doi.org/10.37329/cetta.v6i2.2180

Isnawati, D., & Sholeh, M. (2022). The Influence of School Fees, Age, Gender on Children's Education Level in Indonesia. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, *7*(3), 109. https://doi.org/10.17977/jptpp.v7i3.15198

Junaris Situmorang, Alexandro, R., Sundari, S., & Nibel, H. (2022). Analisis Biaya Kuliah Saat Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UPR. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, *14*(2), 259–265. https://doi.org/10.37304/jpips.v14i2.7729

Lorensius, & Ping, T. (2021). Model Pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi Pada Masa Covid-19. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, *1*(2), 107–119.

Mentari, Wulan, P., Ahmad, M., & Rochimahabc, H. (2025). Analysis of the Increase in Education Costs in Indonesia: Socio-Economic Implications. *Print) Journal of English Language and Education*, *10*(4), 2025.

Nagara, K. B., & Rizal, R. (2025). The Burden of Education Costs for the Middle Class in Indonesia: An Analysis of Challenges and Implications. *The Toro Historical Review*, *26*(2), 153–164. https://doi.org/10.46787/tthr.v14i2.4011

Nursamsu, S., Harto, W., Rahmawati, A., & Indonesia, P. (2021). Education for All? Assessing the Impact of Socio-economic Disparity on Learning Engagement During the COVID-19 Pandemic in Indonesia Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA). *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*, *408*(408). http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/pbm

Oktavina, M., & Wisana, D. G. K. (2025). PENSION COVERAGE AND CHILDREN'S EDUCATION INVESTMENTS IN INDONESIA. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Prasetyo, D., & Megawati, S. (2025). *4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. *10*(12).

Rahmania, E., & Sirozi, M. (2025). The Impact of the Increase in Single Tuition Fees (UKT) on Access to Education at State Universities in Indonesia. *Journal of Educational Sciences*, *9*(4), 1889–1898.

Sari, K., & Wibowo, A. (2024). *KAJIAN PROBLEMATIKA MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN YANG ADA DI INDONESIA*. *10*, 61–77.

Setiawan, S. A. P., Idrak, A. S., & Putri, L. K. (2023). *Hubungan Peningkatan Biaya Pendidikan Dengan Skeptisisme Masyarakat*. *September*, 1–17. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx

Setyadi, S. (2022). The Role Of Government Spending In Education Inequality: Evidence From Indonesia With A Panel Data Analysis. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, *1*, 667–675. https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.126

Murti, T. K., & Hadi, N. U. (2019). Analisis Biaya Pendidikan dan Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Keputusan Siswa Memilih Sekolah di SMP Negeri 1 Karangrejo Tahun Ajaran 2017/2018. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, *7*(1), 32. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v7i1.3839